

Handwritten signature and date: 24/12/24

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
MUSEUM DAN MONUMEN PALAGAN AMBARAWA DI KABUPATEN
SEMARANG**

Rosita Alma Rintawati, R. Slamet Santoso

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponego

Jl. dr. Antonius Suroyo, Universitas Diponegoro, Kampus Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kode Pos 50275 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *stakeholders* serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen palagan Ambarawa. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *stakeholders* yang terlibat meliputi *policy creator* (Bupati Semarang, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kabupaten Semarang, serta Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang); koordinator (Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Unit Pelaksana Teknis Daerah Objek Wisata, serta Koordinator lapangan pengelola objek wisata); fasilitator (Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, serta SCTv Jawa Tengah); implementator (Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Unit Pelaksana Teknis Daerah Objek Wisata, serta Koordinator lapangan pengelola objek wisata); dan akselerator (Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Semarang, Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri, SCTv Jawa Tengah, masyarakat dan wisatawan lokal). Kemudian, faktor pendukung terdiri dari aksesibilitas dan penentu tindakan *stakeholders*. Sementara itu, faktor penghambat terdiri dari persepsi dan partisipasi *stakeholders*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh para *stakeholders* meliputi koordinasi antar *stakeholders* yang belum optimal, keterbatasan sumberdaya anggaran, kurangnya jumlah tenaga kerja serta daya tarik wisata yang kurang menarik. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran untuk peningkatan komunikasi dan kerjasama antar *stakeholders*, penambahan jumlah tenaga kerja dan daya tarik wisata melalui pemanfaatan teknologi digital.

Kata kunci: *Stakeholders*, Peran, Pengembangan objek wisata, Palagan Ambarawa, Wisatawan

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of stakeholders and supporting and inhibiting factors in the development of the Ambarawa Palagan Museum and Monument tourist attraction. This research method is qualitative descriptive with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the roles of stakeholders involved include policy creators (Semarang Regent, Semarang Regency Tourism Office, Semarang Regency Regional Development Planning and Research Agency, and Semarang Regency Regional Finance Agency); coordinators (Semarang Regency Tourism Office, Regional Technical Implementation Unit for Tourism Objects, and Field Coordinators for tourism object management); facilitators (Semarang Regency Tourism Office, Public Works Office, Semarang Regency Environmental Office, Semarang Regency Transportation Office, and Central Java SCTv); implementers (Semarang Regency Tourism Office, Regional Technical Implementation Unit for Tourism Objects, and Field Coordinators for tourism object management); and accelerators (Semarang Regency Tourism Office, Semarang Regency Traditional Media Communication Forum, Raden Wijaya Wonogiri Buddhist College, Central Java SCTv, local communities and tourists). Then, the supporting factors consist of accessibility and determinants of stakeholder actions. Meanwhile, the inhibiting factors consist of stakeholder perceptions and participation. The conclusion of this study is that there are still challenges faced by stakeholders including suboptimal coordination between stakeholders, limited budget resources, lack of workforce and less attractive tourist attractions. Therefore, the researcher provides suggestions for improving communication and cooperation between stakeholders, increasing the number of workers and tourist attractions through the use of digital technology.

Keywords: *Stakeholders, Role, Tourism Object Development, Palagan Ambarawa, Tourists*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan flora, fauna dan budaya dengan berbagai keunikan yang dimiliki menjadi potensi yang sangat besar dan memberikan daya tarik tersendiri terlebih pada kepariwisataan di Indonesia. *World Tourism and Travel Council* (dalam Utami & Kafabih, 2021) menjelaskan bahwa pariwisata adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan bepergian ke dan tinggal di suatu tempat yang dilakukan dengan maksud kesenangan atau kepentingan lainnya di luar lingkungan masyarakat, provinsi dan negara tertentu dalam jangka waktu sementara waktu. Suatu daerah atau negara dapat mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar apabila pengembangan pariwisata dilakukan secara maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya formulasi dengan melibatkan seluruh *stakeholders* agar pengelolaan dan pengembangan pariwisata mampu terlaksana secara optimal (Fatin dkk., 2024).

Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki beragam kearifan lokal dan keindahan alam di berbagai daerahnya. Dalam mengembangkan sektor pariwisata, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah mencanangkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Dalam mendukung upaya tersebut, Pemerintah Jawa Tengah melaksanakan Gerakan Bersama yakni mengikutsertakan seluruh *stakeholders* baik pemerintah maupun non pemerintah dalam setiap rencana aksi yang dilakukan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus

mengembangkan destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

Tahun	Wisatawan	
	Domestik	Mancanegara
2019	57.900.663	691.699
2020	22.629.085	78.290
2021	21.332.409	1.793
2022	46.465.437	144.691
2023	56.485.087	464.719

Sumber : Telah diolah kembali dari Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2024

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata cukup besar dan termasuk dalam destinasi wisata unggulan, dengan jumlah kunjungan wisatawan yang relatif tinggi. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020 – 2025 menjadi dasar kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Semarang. Peraturan tersebut mencakup visi, rencana, dan arah pengembangan kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Selain itu, peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa dalam pembangunan pariwisata diperlukan keterlibatan peran *stakeholders* melalui proses perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata.

Museum dan Monumen Palagan Ambarawa merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang terletak di Desa Panjang Lor, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Sebagaimana yang

telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025 Museum dan Monumen Palagan Ambarawa termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Semarang (KSPK) karena daya tarik wisata ini memiliki potensi untuk dilakukannya pengembangan pariwisata.

Tabel 1.2 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Objek Wisata yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2023

Objek Wisata	Jumlah Wisatawan	
	2022	2023
Candi Gedong Songo	425.738	358.159
Pemandian Muncul	142.440	106.844
Muncul Waterpark	55.799	46.091
Bukit Cinta	203.594	171.304
Palagan Ambarawa	28.847	29.468

Sumber : Telah Diolah Kembali dari Kabupaten Semarang dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel 1.2 yang menyajikan jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tahun 2022 – 2023 bahwa jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa relative sedikit dibandingkan objek wisata lain.

Peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa menjadi salah satu permasalahan yang terjadi dalam proses pengembangan objek wisata. Apabila ditinjau dari pengembangan objek

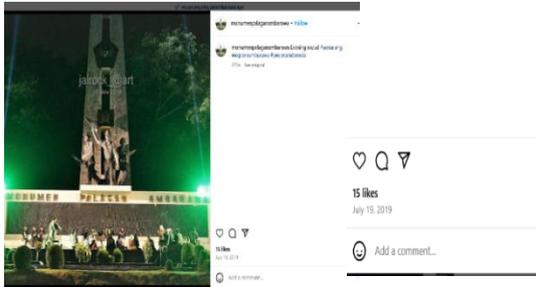
wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa terdapat permasalahan salah satunya terkait dengan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai aktor utama dalam hal pengadaan dan penyediaan fasilitas yang belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa tidak terawat dengan baik, sehingga potensi objek wisata ini kurang diminati oleh pengunjung.

Koordinator lapangan sebagai pengelola objek wisata di bawah naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang memiliki peran sebagai pelaksana kegiatan pariwisata. Namun, masih terdapat kendala dalam peran yang dimainkan yakni keterbatasan jumlah tenaga kerja yang ada di Museum dan Monumen Palagan Ambarawa. Selanjutnya, masih lemahnya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai *stakeholders* pariwisata khususnya pada objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa yang diakibatkan karena intensitas komunikasi antar *stakeholders* yang terlibat masih belum efektif dalam mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah.

Sinergitas dan kemitraan antar *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa juga belum optimal. Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan Koordinator lapangan bahwa dalam pengembangan objek wisata Monumen Palagan Ambarawa belum ada keterlibatan pihak bisnis atau privat

Pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa pada dasarnya harus diimbangi dengan promosi pariwisata. Akan tetapi, sejauh ini, kegiatan promosi objek wisata Museum

dan Monumen Palagan Ambarawa belum dilaksanakan secara optimal karena minimnya potensi objek wisata serta promosi yang dilakukan cenderung tidak menarik dan tidak atraktif.



Gambar 1.1 Postingan Terakhir Instagram Museum dan Monumen Palagan Ambarawa

Sumber : Akun Instagram Museum dan Monumen Palagan Ambarawa

Peran masyarakat dalam mendukung pengembangan objek wisata terbilang kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sektor pariwisata dengan ikut melaksanakan, menjaga dan merawat objek wisata. Selain itu, masyarakat juga menganggap jika yang memiliki kuasa penuh untuk mengembangkan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa hanya pemerintah daerah saja sehingga mereka tidak memiliki andil dalam pengembangan objek wisata tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa** untuk mengetahui masalah “Mengapa peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan

Monumen Palagan Ambarawa masih belum optimal?”

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran *stakeholders* dalam pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang?

Tujuan Penelitian

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran *stakeholders* dalam pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.
2. Mengidentifikasi faktor yang menjadi pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang.

B. KERANGKA TEORI

Stakeholders

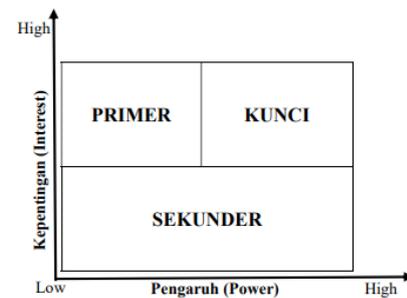
Ariyanto & Marom (2017) mendefinisikan *stakeholders* adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan berbeda-beda dan memiliki kemampuan untuk saling mempengaruhi maupun dipengaruhi dalam lingkungan organisasi, baik

internal maupun eksternal. Sementara itu, Usu dkk., (2022) mengemukakan *stakeholders* sebagai pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, media dan akademisi dimana mereka menjadi suatu kelompok individu yang mendapatkan keuntungan atau kerugian atas pelaksanaan suatu program.

Identifikasi *Stakeholders*

Maryono dkk., (dalam Kesami dkk., 2021) mengidentifikasi *stakeholders* menjadi 3, yaitu :

1. *Stakeholders* Primer adalah pihak yang secara langsung terdampak oleh suatu kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap suatu kebijakan, program, maupun kegiatan. *Stakeholders* primer ini memiliki kepentingan paling kuat sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Stakeholders* Sekunder adalah pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung dalam suatu kebijakan, program, maupun kegiatan. *Stakeholders* sekunder memberikan dampak yang lebih kecil dalam proses pengambilan keputusan.
3. *Stakeholders* Kunci adalah pihak utama yang secara legalitas memiliki pengaruh, kepentingan atau kekuasaan tinggi dalam proses pengambilan keputusan pada pembuatan kebijakan.



Gambar 1.2 Matriks Identifikasi *Stakeholders*

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2024

Peran *Stakeholders*

Nugroho dkk., (2014) menyatakan bahwa pada saat menganalisis peran *stakeholders* dalam implementasi suatu kebijakan, *stakeholders* dapat diklasifikasikan berdasarkan peran dan tugasnya masing-masing, yakni :

1. *Policy creator*, pihak yang mempunyai peran strategis dalam merumuskan dan merancang kebijakan yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintahan.
2. Koordinator, pihak yang mempunyai peran untuk memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat. Adapun koordinasi yang terjadi dilakukan secara internal dan eksternal.
3. Fasilitator, pihak yang memiliki peran dalam menunjang dan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses kerjasama dalam suatu kegiatan.
4. Implementor, pihak yang memiliki peran menyelenggarakan tindakan nyata dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
5. Akselerator, pihak yang memiliki peran untuk mendukung dan mempercepat keberjalanan suatu kebijakan atau program sehingga dapat dilaksanakan sesuai sasaran dan waktu pencapaiannya

lebih cepat serta mengurangi hambatan yang menghambat proses kemajuan program.

Faktor Pendorong dan penghambat

Husnul Yakin (dalam Satia & Safitri, 2018) menyatakan bahwa terdapat empat faktor penentu yang dapat mendorong dan menghambat peran *stakeholders* dalam proses implementasi suatu kebijakan, diantaranya sebagai berikut :

1. Partisipasi *stakeholders* merupakan peran serta individu atau sejumlah individu berupa pemberian pendapat, saran, ide, tenaga, waktu, keahlian maupun modal dalam berbagai tahap kegiatan, program, atau kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
2. Aksesibilitas *stakeholders* merupakan kemudahan yang dimiliki oleh para *stakeholders* dalam mendapatkan informasi, sumber daya atau kemampuan dari atas maupun bawah untuk mempengaruhi suatu kebijakan, keputusan atau program.
3. Perspektif *stakeholders* merupakan sikap, pandangan, dan sudut pandang yang dimiliki oleh para *stakeholders* tertentu terhadap suatu situasi, konteks atau proses yang ada.
4. Penentu tindakan merupakan aspek atau elemen yang mempengaruhi atau menentukan seseorang atau sekelompok orang dalam membuat keputusan dan bertindak dalam situasi tertentu.

Pengembangan Pariwisata

Menurut Meutuah dkk., (2023) menjelaskan bahwa dalam pengembangan pariwisata terdapat

komponen kepariwisataan yaitu 6A yang meliputi :

1. *Attraction* (Atraksi), yaitu sesuatu yang memiliki daya tarik yang kuat sehingga mampu menarik perhatian wisatawan untuk mengunjungi tujuan wisata tertentu.
2. *Accessibilities* (Akses), merujuk pada kemudahan bagi para wisatawan untuk mencapai dan mengakses suatu destinasi pariwisata sehingga memungkinkan wisatawan tersebut dengan mudah mengunjungi dan menikmati objek wisata.
3. *Amenities* (Fasilitas Pendukung), merujuk pada sarana dan prasarana penunjang yang ada guna meningkatkan kepuasan, kenyamanan dan pengalaman wisatawan selama berkunjung ke suatu destinasi wisata.
4. *Accommodation* (Akomodasi), merujuk pada penyediaan fasilitas tempat tinggal atau penginapan selama wisatawan mengunjungi destinasi wisata sehingga dapat meningkatkan pengalaman wisatawan.
5. *Activities* (Aktivitas), merujuk pada serangkaian kegiatan atau pengalaman yang dapat didapatkan oleh para wisatawan saat mengunjungi destinasi wisata sehingga dapat meningkatkan daya tarik pariwisata.
6. *Ancillary Services* (Layanan Pendukung), merujuk pada berbagai pelayanan tambahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan mendukung pengalaman wisatawan selama berkunjung.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lokus pelaksanaan penelitian yakni di objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa. Fokus penelitian adalah identifikasi dan peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata. Subjek penelitian adalah Subjek penelitian adalah individu atau pihak yang menyatakan informasi maupun data kepada peneliti atau wawancara tentang dirinya, orang lain, kejadian atau lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian Afrizal (2014). Penelitian menggunakan data kualitatif dari data primer yang berasal dari wawancara langsung dengan informan dan observasi di lokasi penelitian, serta data sekunder dari dokumen yang diperoleh peneliti. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas data diuji dengan menggabungkan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi *Stakeholders*

Berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga klasifikasi *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa yaitu *stakeholders* kunci, *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder.

1. *Stakeholders* kunci

a. Bupati Semarang

Kepala Daerah (bupati) Semarang berperan sentral dengan menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah dan

memimpin pelaksanaan berbagai kegiatan dan program termasuk dalam pembuatan kebijakan pengembangan di sektor pariwisata, salah satunya Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.

b. Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Semarang

Disparta Kabupaten Semarang sebagai lembaga daerah yang berwenang menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan objek wisata objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.

c. Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Semarang

Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Semarang dalam kewenangannya berperan strategis dalam merancang dan mengarahkan pengembangan sektor pariwisata melalui fungsi perencanaan pembangunan daerah.

d. Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang

Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang berperan mendukung pengembangan objek wisata dari sisi keuangan dan pengelolaan aset daerah guna memastikan program-program pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa terlaksana dengan baik.

2. *Stakeholders* primer

a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Objek Wisata

UPTD bertanggung jawab langsung atas operasional objek wisata sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Disparta Kabupaten Semarang.

- b. Koordinator lapangan pengelola objek wisata
Koordinator lapangan berperan secara langsung untuk memastikan kegiatan operasional harian di Museum dan Monumen Palagan Ambarawa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. *Stakeholders* sekunder
- a. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang
Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Semarang berperan membantu dalam pembangunan infrastruktur di objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.
- b. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang berperan dalam pengembangan potensi sumber daya lingkungan dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.
- c. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Semarang
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Semarang berperan dalam perencanaan dan pengembangan sarana prasarana dasar di Museum dan Monumen Palagan Ambarawa guna meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan.
- d. Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri
Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri melalui program kerja Praktik Kerja Lapangan (PKL) mampu meningkatkan daya tarik wisata dengan menciptakan paket wisata dan membantu mempromosikan objek wisata Palagan Ambarawa melalui social media *Instagram*.
- e. Media massa SCTv Jawa Tengah
Media massa SCTv Jawa Tengah turut berperan mendukung pengembangan objek wisata dengan promosi, penyebaran informasi, dan membantu meningkatkan visibilitas objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.
- f. Masyarakat
Masyarakat sekitar memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan dan keberlanjutan objek wisata yakni melalui keterlibatan aktif sebagai pekerja dan pedagang di objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.
- g. Wisatawan lokal
Wisatawan sebagai sumber utama pendapatan objek wisata berkontribusi mendukung pengelolaan yang baik dan berkelanjutan sehingga mempercepat proses pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa yang lebih optimal.

Peran *Stakeholders*

Berdasarkan hasil penelitian terdapat lima peran yang dimiliki *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

1. *Policy creator*

Kepala Daerah (bupati) Semarang menjadi pemimpin strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan, termasuk di sektor pariwisata. Kepala Daerah (Bupati) Semarang memberikan

kewenangan kepada Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Semarang untuk mengurus bidang kepariwisataan di Kabupaten Semarang sesuai dengan peraturan dan tanggung jawabnya, Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Semarang menjalin kerjasama dengan Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kabupaten Semarang dalam merumuskan dan merencanakan pengembangan objek wisata, salah satunya Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.

2. Koordinator

Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Semarang menjadi *leading sector* dalam mengkoordinasikan berbagai program dalam pengembangan objek wisata Monumen Palagan Ambarawa yang meliputi pembangunan infrastruktur, promosi wisata dan kerjasama dengan berbagai pihak lainnya. Namun, masih belum optimal karena dihadapkan dengan karakter masyarakat yang sulit diatur dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Objek Wisata dan Koordinator lapangan pengelola objek wisata juga memainkan peran koordinatif yang mencakup pengorganisasian, pengawasan, serta pelaksanaan operasional yang ada di lapangan. Namun, partisipasi sektor swasta yang masih minim menunjukkan belum optimalnya peran koordinasi dalam perkembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.

3. Fasilitator

Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Semarang berkontribusi secara aktif sebagai fasilitator utama dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa, yakni dengan memberikan fasilitas baik secara fisik maupun non-fisik. Pembangunan secara fisik berupa bangunan mushola, Gedung TIC (Tourist Information Center), toilet, gazebo, permainan anak-anak, tong sampah, plang penunjuk arah dan sebagainya. Sementara itu, untuk pembangunan non-fisik meliputi pembinaan dan pelatihan pengembangan objek wisata kepada pengelola untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengelola bidang usaha pariwisata guna memberikan pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan. Namun, Disparta Kabupaten Semarang menemui kendala yakni keterbatasan anggaran.

Disparta Kabupaten Semarang bekerjasama dengan DPU Kabupaten Semarang yang memegang peran dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur pendukung. DLH Kabupaten Semarang bertugas menjaga keberlanjutan lingkungan melalui penghijauan dan pelestarian area sekitar objek wisata. Dishub Kabupaten Semarang yang mendukung pengembangan objek wisata melalui penyediaan penerangan jalan yang memadai sehingga meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Media massa SCTv Jawa Tengah turut berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan *platform* utama untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi objek

wisata yang dikemas melalui program dan liputan yang menarik.

4. Implementator

Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Semarang mempunyai peranan signifikan sebagai pelaksana kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirancang untuk meningkatkan daya tarik wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan pengembangan Museum dan Monumen Palagan pengembangan dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola agar dapat pengetahuan dan pemahamannya dalam mengembangkan kepariwisataan. Selain itu, Disparta juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberjalanan pelaksanaan objek wisata guna memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang telah direncanakan memberikan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) objek wisata turut memiliki peranan sebagai implementor yang berfungsi untuk menjalankan kebijakan, program dan arahan, terutama berkaitan dengan pengelolaan operasional objek wisata, termasuk perawatan fasilitas, pengawasan kegiatan, dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata. Akan tetapi, kurangnya personil atau tenaga kerja pengelola yang ada menjadi permasalahan yang dihadapi UPTD. Koordinator lapangan turut serta sebagai *stakeholders* yang berperan menjalankan kebijakan dan menjamin operasional harian di objek wisata berjalan lancar. Koordinator lapangan

menjadi penghubung strategi dari pengelola dengan pelaksanaan teknis di lapangan, menangani berbagai kendala operasional, dan memastikan bahwa wisatawan mendapatkan pengalaman berwisata yang memuaskan. Namun, ditemukan permasalahan kurangnya sumber daya pengelola yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan peran dan tanggung jawab UPTD dan koordinator lapangan sebagai *stakeholders* pelaksana.

5. Akselerator

Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Semarang dalam mempercepat perkembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa dilakukan melalui kegiatan promosi pariwisata baik secara media digital maupun konvensional. Namun, Disparta Kabupaten Semarang menghadapi kendala yang menghambat kemajuan pengembangan objek wisata Monumen Palagan Ambarawa, yaitu keterbatasan anggaran dalam mempromosikan objek wisata dan minimnya lahan yang mengakibatkan kurangnya daya tarik wisata.

Media massa SCTv Jawa Tengah turut membantu Disparta Kabupaten Semarang dalam pengembangan objek wisata dengan menyebarkan dan mempublikasikan informasi melalui liputan yang menarik terkait dengan objek wisata Palagan Ambarawa. Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri membantu mempercepat pengembangan objek wisata Monumen Palagan dengan berinovasi dalam menyediakan paket wisata dan membuat konten promosi menarik. Wisatawan lokal membantu dengan memberikan dukungan

finansial melalui pembelian tiket dan sebagai agen promosi dengan membagikan pengalaman berwisata ke social media. Sedangkan masyarakat menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang

berkontribusi nyata sebagai pekerja dan pedagang di objek wisata Monumen Palagan Ambarawa, namun keterlibatannya masih sangat kurang.

Tabel 1.3 Identifikasi dan Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa Kabupaten Semarang

No.	Stakeholders	Identifikasi Stakeholders	Peran Stakeholders	Peran
1.	Bupati Semarang	Stakeholders kunci	Policy creator	<ol style="list-style-type: none"> 1) Merumuskan, menetapkan, dan mengarahkan kebijakan pembangunan di wilayahnya, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata 2) Memberikan mandat dan arahan pengembangan pariwisata kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang selaku OPD bidang kepariwisataan.
2.	Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Semarang	Stakeholders kunci	Policy creator	Menyusun dan merancang kebijakan, program serta mengambil keputusan strategis pengembangan pariwisata.
			Koordinator	Mengkoordinasikan <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata.
			Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada SDM pariwisata untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan dengan membuat program pengembangan kapasitas SDM pengelola pariwisata; 2) Membangun sarana prasarana dan daya tarik di objek wisata Palagan Ambarawa; 3) Melakukan promosi pariwisata baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> serta membuat materi promosi dan mengadakan pameran

No.	Stakeholders	Identifikasi Stakeholders	Peran Stakeholders	Peran
				pariwisata baik dalam maupun luar daerah.
			Implementor	Menjalankan arahan bupati dalam mewujudkan visi dan rencana pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan.
			Akselerator	Melaksanakan kegiatan promosi dan kegiatan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa
3.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Semarang	<i>Stakeholders</i> kunci	<i>Policy creator</i>	Menyusun dan merancang kebijakan terkait pengembangan pariwisata.
4.	Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang	<i>Stakeholders</i> kunci	<i>Policy creator</i>	Merumuskan kebijakan teknis terkait anggaran dan pendapatan dalam pengembangan pariwisata.
5.	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Objek Wisata	<i>Stakeholders</i> primer	Koordinator	Mengelola dan mengawasi program pengembangan pariwisata secara langsung di lapangan serta melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan koordinator lapangan.

No.	Stakeholders	Identifikasi Stakeholders	Peran Stakeholders	Peran
			Implementator	Menjalankan dan melaksanakan pengembangan pariwisata sesuai arahan dari Bupati Semarang dan Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Semarang.
6.	Koordinator lapangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa	<i>Stakeholders</i> primer	Koordinator	Mengelola dan mengawasi kegiatan operasional sehari-hari langsung di objek wisata Palagan Ambarawa serta melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan UPTD objek wisata
			Implementator	Menjalankan dan melaksanakan pengembangan pariwisata secara langsung di lapangan sesuai arahan dari UPTD dan Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Semarang.
7.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang	<i>Stakeholders</i> sekunder	Fasilitator	Memfasilitasi pengembangan potensi sumber daya lingkungan dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.
8.	Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang	<i>Stakeholders</i> sekunder	Fasilitator	Memfasilitasi perencanaan dan pengembangan sarana prasarana dasar di Destinasi Pariwisata untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.
9.	Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Semarang	<i>Stakeholders</i> sekunder	Fasilitator	Memfasilitasi rambu-rambu dan penerangan di Daya Tarik Wisata Palagan Ambarawa.
10.	FK Metra Tradisional Kabupaten Semarang	<i>Stakeholders</i> sekunder	Akselerator	Membantu menarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai acara pariwisata dan membantu promosi objek wisata untuk mendatangkan wisatawan.
11.	Media Massa SCTv Jawa Tengah	<i>Stakeholders</i> sekunder	Fasilitator	Menyediakan platform dan wartawan

No.	Stakeholders	Identifikasi Stakeholders	Peran Stakeholders	Peran
			Akselerator	Mempublikasikan pemberitaan objek wisata Palagan Ambarawa melalui liputan menarik dan informatif yakni pada program “Wayah e Dolan”.
12.	Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri	Stakeholders sekunder	Akselerator	Membuat inovasi paket wisata dan mempromosikan objek wisata melalui platform Instagram.
13.	Pedagang Monumen Palagan Ambarawa	Stakeholders sekunder	Akselerator	Masyarakat terlibat aktif sebagai tenaga kerja dan pedagang di objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.
14.	Wisatawan lokal	Stakeholders sekunder	Akselerator	Wisatawan secara langsung memberikan kontribusi terhadap pendapatan objek wisata melalui pembelian tiket

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2024

Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Faktor Pendorong

A. Aksesibilitas Stakeholders

Disparta Kabupaten Semarang yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Semarang memastikan aksesibilitas dalam mengembangkan objek wisata dengan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki kemudahan dalam mengakses informasi, infrastruktur, dan sumber daya yang diperlukan melalui forum koordinasi dan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Semarang memanfaatkan media sosial Instagram dan situs web sebagai sarana untuk menunjukkan aksesibilitas dalam pengembangan objek wisata dengan memberikan

informasi yang mudah dijangkau oleh wisatawan dan *stakeholders* lain.

B. Penentu Tindakan

Disparta Kabupaten Semarang dalam mengembangkan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa termuat dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) sebagai pedoman yang mengarahkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan objek wisata. Penganggaran terkait pengembangan objek wisata sendiri telah diatur secara jelas dan terstruktur oleh pemerintah daerah melalui APBD, sehingga dengan penyediaan anggaran yang jelas dan terencana maka setiap aspek pengembangan, mulai dari infrastruktur, promosi, pelatihan, hingga pemeliharaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Adanya peraturan yang jelas, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Hal ini bertujuan agar proses pengembangan dapat berjalan dengan lebih terarah dan terkendali sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Faktor Penghambat

A. Perspektif *Stakeholders*

Perbedaan persepsi dari *stakeholders* pelaksana yakni Disparta Kabupaten Semarang terkait dengan pemahaman dan pedoman pelaksanaan kebijakan pengembangan objek wisata menjadikan kebijakan ini belum berjalan optimal. Selain itu, perspektif *stakeholders* terutama Disparta Kabupaten Semarang dengan kelompok kepentingan lain belum mencapai kesepahaman yang berjalan selaras. Dari segi *stakeholders* masyarakat sendiri juga masih memiliki perspektif yang kurang baik dimana mereka tidak mau memberikan aspirasi sehingga mereka

beranggapan keterlibatannya tidak dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata. Wearing & Donald (dalam Mulyan & Isnaini, 2022) bahwa keterlibatan masyarakat lokal memiliki peran yang sama penting dengan pemerintah dan sektor swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam pengembangan pariwisata.

B. Partisipasi *Stakeholders*

Kurangnya keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan manfaat pariwisata, serta minimnya edukasi dan pelibatan dalam perencanaan, mengakibatkan terbatasnya dukungan masyarakat lokal. Di sisi lain, rendahnya keterlibatan swasta yang disebabkan oleh kurangnya daya tarik ekonomi dan tidak ada insentif menarik akan memperlambat perkembangan objek wisata

E. KESIMPULAN

Stakeholders dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa diidentifikasi menjadi tiga yaitu *stakeholders* kunci, *stakeholders* primer, dan *stakeholders* sekunder, sebagai berikut :

1. *Stakeholders* kunci meliputi Bupati Semarang, Disparta Kabupaten Semarang, Bapperida Kabupaten Semarang, dan BKUD Kabupaten Semarang.
2. *Stakeholders* primer meliputi UPTD objek wisata dan koordinator lapangan pengelola objek wisata,

3. *Stakeholders* sekunder meliputi DPU Kabupaten Semarang, Dishub Kabupaten Semarang, DLH Kabupaten Semarang, FK Metra Kabupaten Semarang, Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri, Biro pariwisata dan *Tour leader*, SCTv Jawa Tengah, masyarakat setempat serta wisatawan lokal.

Peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa diklasifikasikan menjadi lima, yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

1. *Policy creator* meliputi Bupati Semarang, Disparta Kabupaten Semarang, Bapperida Kabupaten Semarang dan

BKUD Kabupaten Semarang telah menjalankan perannya berperan sebagai pembuatan kebijakan membentuk suatu kerangka yang jelas dan efektif yang menjadi pedoman pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa.

2. Koordinator meliputi Disparta Kabupaten Semarang, UPTD Objek Wisata dan koordinator lapangan pengelola objek wisata. Disparta Kabupaten Semarang yang paling berperan dalam peran koordinator masih belum maksimal karena masyarakat yang memiliki sikap yang sulit diatur dan mengutamakan kepentingan pribadi sehingga menghambat proses koordinasi. Kemudian, keterlibatan pihak swasta belum nampak sehingga menunjukkan peran koordinator yang dijalankan oleh ketiga *stakeholders* tersebut belum mampu menjalin kerjasama secara menyeluruh.
3. Fasilitator meliputi Disparta Kabupaten Semarang, DPU Kabupaten Semarang, Dishub Kabupaten Semarang, DLH Kabupaten Semarang, dan SCTv Jawa Tengah. *Stakeholders* dengan paling berperan dalam peran fasilitator adalah Disparta Kabupaten Semarang, namun belum maksimal karena keterbatasan anggaran.
4. Implementator meliputi Disparta Kabupaten Semarang, UPTD Objek Wisata dan koordinator lapangan pengelola objek wisata. Peran implementator oleh UPTD Objek Wisata dan koordinator lapangan mengalami kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia pengelola objek wisata.
5. Akselerator meliputi Disparta Kabupaten Semarang, SCTv Jawa

Tengah, Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri, FK Metra Kabupaten Semarang, masyarakat setempat dan wisatawan. Peran akselerator oleh Disparta Kabupaten Semarang masih belum optimal karena keterbatasan anggaran dalam mempromosikan objek wisata. Selain itu, keterbatasan lahan wisata yang mengakibatkan kurangnya daya tarik wisata menjadikan peran ini belum optimal.

F. SARAN

- a. Guna mengoptimalkan peran koordinator dengan meningkatkan kepercayaan antar *stakeholders* untuk menjalin kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan objek wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa,
- b. Guna mengoptimalkan peran fasilitator dalam pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi dengan memulai bekerjasama dengan pihak swasta untuk membantu adanya sumber pendanaan dengan melalui perjanjian kemitraan yang jelas dan saling
- c. Guna mengoptimalkan peran implementator dengan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia dan penambahan jumlah tenaga kerja pengelola secara langsung di lapangan melalui kerjasama dengan dinas lain agar meningkatkan pengelolaan objek wisata lebih efektif dan berkualitas.
- d. Guna mengoptimalkan peran akselerator dengan penambahan daya tarik wisata melalui pemanfaatan teknologi digital dan menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan

media massa SCTv Jawa Tengah melalui pembuatan MoU.

- e. Meningkatkan keselarasan pemahaman antar pelaksana dengan meningkatkan komunikasi secara terbuka melalui pertemuan rutin dan memanfaatkan saluran komunikasi seperti grup whatsapp untuk memaksimalkan berbagi informasi dan umpan balik.
- f. Perlunya meningkatkan strategi komunikasi yang inklusif dan inovatif dengan *stakeholders* lain untuk membangun rasa kepemilikan yang lebih kuat sehingga dapat mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, E. D., & Marom, A. (2021). Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Pilah Sampah Di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10.
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi Dan Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *Inobis: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.179>
- Bramana, S. R. (2018). Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Alam Di Kabupaten Jombang. *Ilmu Administrasi Negara*, 1–7.
- Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonopolo Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(4), 159–175.
- Destiana, R., Yuningsih, T., Imam, J., Sh, B., Semarang, N., Aksi, R., & Penyengat, P. (2020). Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau Indonesia Berdasarkan Global Muslim Travel Index (Gmti) 2019 Menjadi Pengembangan Destinasi Pariwisata Mengenai Sarana Dan Parasarana Pe. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)*, 08(02), 132–153.
- Kesami, P. N., Arismayanti, N. K., & Sari, N. P. R. (2021). Peran Dan Hambatan *Stakeholders* Dalam Penyediaan Fasilitas Dan Aksesibilita Pariwisata Bagi Wisatawan Disabilitas. *Jurnal Kepariwisata Dan Hospitalitas*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24843/Jkh.2021.V05.I01.P01>
- Meutuah, Z. N., Caisarina, I., & Dewi, C. (2023). Pemetaan Komponen Pariwisata (6a) Untuk Perencanaan Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus: Gampong Naga Uambang, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*, 6(4), 118–124.
- Muslimah, W., Febiani, D., Ulayani, T., & Mawardi, F. P. (2024). Optimasi Tata Kelola Sebagai Upaya Pengembangan Objek Wisata Melalui Pendekatan Community Based Tourism. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (Jpmi)*, 02.
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 5(1), 12–22. <https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/147>
- Pramesti, R., Kismartini, & Suwitri, S. (2024). Peran Aktor Dalam Pengembangan Wisata Kampung Pelangi Di Kelurahan Randusari

Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13.

Satia, M. R., & Safitri, R. N. (2018). Analisis Aktor Pelaksana Dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Di Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1–7.

Utami, B. A., & Kafabih, A. (2021). Sektor Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 383–389.
<https://doi.org/10.33005/Jdep.V4i1.198>

Dokumen :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka 2021 – 2024

Kabupaten Semarang dalam Angka 2024